

UPAYA INDONESIA MENDAFTARKAN SENI PEMBUATAN KAPAL PINISI KEDALAM *INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* UNESCO

Ruth Octavia Mairering¹, Penny Kurnia Putri², A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³
^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: octavia_ruth@ymail.com¹, penny.tjokrodiharjo@gmail.com², aabasuwinu@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to describe how the Indonesian government's efforts to register the Pinisi boatbuilding art as Intangible Cultural Heritage from UNESCO using descriptive qualitative methods. Joko Widodo's regime voice the nation's maritime power through the agenda of Indonesia as the world's maritime nexus by five main pillars which are development focus, one of them is maritime tourism. As an archipelagic country, Indonesia has a legacy in the nation's historical heritage as maritime country. The legacy itself is a traditional Pinisi boat by the Bugis, a South Sulawesi tribe. Pinisi officially became a part of UNESCO Intangible Cultural Heritage on December 7th, 2017. Therefore, this research used the concept of Intangible Cultural Heritage to analyze the Art of making Pinisi boat and Multi-Track Diplomacy to analyze what diplomacy track are used to support the registration process.

Keywords : *Pinisi Boat, Intangible Cultural Heritage, Multi-Track Diplomacy and UNESCO*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan fakta geografis dan historis menunjukkan bahwa Indonesia (yang dahulu dikenal dengan Nusantara) adalah negara kepulauan terbesar yang pernah memiliki armada maritim yang kuat dan berjaya di kawasan Asia Pasifik (Geotimes, 2017). Rezim Presiden Joko Widodo menggemakan kembali kekuatan maritim bangsa melalui agenda Indonesia sebagai poros maritim dunia. Agenda nasional tersebut dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo melalui pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) East Asia Summit (EAS) ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014.¹ Terdapat lima pilar utama yang

menjadi fokus pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Penyampaian Presiden Joko Widodo terkait kelima pilar dari kebijakan poros maritim ini, secara langsung mewakili

2. Menjaga sumber daya laut serta menciptakan kedaulatan pangan laut dengan nelayan berada di pilar utama

3. Prioritas pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan cara membangun tol laut, deep seaport, industri perkapalan, logistik, dan pariwisata maritim

4. Mengaplikasikan diplomasi maritim, dengan usulan peningkatan kerja sama dalam bidang maritim serta upaya menangani sumber konflik seperti pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, pencurian ikan, dan pencemaran laut dengan menekan bahwa laut dari menjadi pemersatu berbagai bangsa dan negara, bukan pemisah.

5. Membangun kekuatan maritim sebagai suatu bentuk tanggung jawab demi menjaga keselamatan pelayaran dan juga keamanan maritim (Kemenlu, 2015)

¹1. Kembali membangun budaya maritim

doktrin baru tentang politik luar negeri Indonesia. Salah satu hal menarik dari pidato Presiden Joko Widodo adalah terkait pariwisata maritim.

Bentuk usaha Indonesia untuk menciptakan pariwisata maritim dapat diwujudkan dengan pemanfaatan sumber daya alam ataupun peninggalan sejarah bangsa Indonesia. Bukti jejak keberanian serta pengetahuan bangsa Indonesia akan maritim pada masa lalu adalah peninggalan kapal tradisional Pinisi dari suku Bugis-Sulawesi Selatan. Dilihat dari sisi historis, banyak filosofi yang terkandung dalam proses pembuatan Kapal Pinisi. Ciri khasnya yang membuat terkenal adalah jumlah tiang layar utamanya. Jumlah tiang layar utama kapal ada dua, dengan tujuh buah layar. Terdapat tiga layar di bagian ujung depan kapal, dua layar di tengah, dan dua layar di bagian belakang kapal (Amir, 2016 : 2).

Pemerintah Indonesia melihat prospek Kapal Pinisi sebagai media untuk kembali memperkenalkan kejayaan maritim bangsa ke dunia internasional melalui kebudayaan. Sekaligus dapat menjadi salah satu objek pendukung pembangunan pariwisata bahari sesuai dengan agenda kebijakan Presiden Joko Widodo, sesuai pidatonya di KTT EAS. Pada tahun 2015, pemerintah Indonesia telah mendaftarkan Kapal Pinisi ke Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO (Kemendikbud, 2017). Pengajuan Kapal Pinisi ke UNESCO oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk diplomasi untuk mengenalkan kepada dunia tentang

Kapal Pinisi, sekaligus dapat menjadi bentuk dukungan dalam mewujudkan agenda Presiden Joko Widodo membangun pariwisata maritim.

Proses untuk mendapatkan pengakuan atas Kapal Pinisi tentu tidaklah mudah, karena harus memenuhi persyaratan dalam *The List of Intangible Cultural Heritage*. Setelah melewati proses panjang, Kapal Pinisi secara resmi diakui sebagai *Intangible Cultural Heritage* oleh UNESCO pada tanggal 7 Desember 2017 di Pulau Jeju, Korea Selatan dalam sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2017 (Kemendikbud, 2017). Keberhasilan perjuangan untuk memperoleh pengakuan Kapal Pinisi sebagai warisan budaya takbenda ini, tak lepas dari peran pemerintah Indonesia, meskipun Indonesia juga harus bersaing dengan kebudayaan negara lain yang juga didaftarkan ke UNESCO. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik ingin meneliti bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan seni pembuatan Kapal Pinisi kedalam *Intangible Cultural Heritage/ UNESCO*.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Literatur yang pertama adalah tulisan dari Afrit Arif (2019) yang membahas pengakuan UNESCO terhadap Sistem *Subak* Bali sebagai warisan budaya dunia. Afrit menggunakan teori organisasi

internasional, yang menyimpulkan bahwa UNESCO mengakui Sistem *Subak* Bali sebagai warisan budaya dunia karena Sistem *Subak* memiliki nilai sejarah, konsep *Tri Hita Karana*, serta adanya *good governance* yang merupakan *Outstanding Universal Values* dari Sistem *Subak* Bali.

Literatur kedua yang digunakan merupakan tulisan dari Nuvola Gloria dan Syafi Harto (2012) yang membahas tentang diplomasi Indonesia terhadap UNESCO dalam meresmikan Noken sebagai warisan budaya Indonesia tahun 2012. Nuvola dan Syafi melihat bagaimana Indonesia mendaftarkan Noken ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan sebagai *Intangible Cultural Heritage* dengan menggunakan *Multi-Track Diplomacy* sebagai model diplomasi yang digunakan pemerintah, yang menyimpulkan bahwa Indonesia menggunakan diplomasi jalur pertama (melalui pemerintah), diplomasi jalur kedua (melalui lembaga non-pemerintah), jalur keempat (melalui warga negara), jalur kelima (melalui pendidikan), dan jalur kesembilan (melalui media).

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah warisan budaya takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) dan Diplomasi Multi-Jalur (*Multi-Track Diplomacy*).

Warisan Budaya Takbenda

Warisan budaya takbenda adalah konsep yang diadopsi oleh UNESCO untuk menyatukan pendapat dan pemahaman bersama diantara banyak aktor tingkat internasional (UNESCO : *Define and Identify Intangible Cultural Heritage*, 2011).

Definisi warisan budaya takbenda merujuk dari UNESCO *For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* 2003, Pasal 2 Ayat 1, yaitu:

Warisan budaya takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ketrampilan – serta instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya – yang oleh masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus, individu/perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya takbenda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, serta interaksi mereka dengan alam dan sejarahnya, dan memberi mereka identitas diri secara berkelanjutan, sehingga mendorong adanya rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia.

Ruang lingkup warisan budaya takbenda kemudian dibagi menjadi lima yakni Tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat isitiadat, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, dan kemahiran kerajinan tradisional. Konsep ini digunakan untuk membantu penelitian dalam melihat Kapal Pinisi sebagai *warisan budaya takbenda* yang diajukan pemerintah Indonesia ke UNESCO.

Diplomasi Multi-Jalur

Diplomasi multi-jalur adalah salah satu bentuk diplomasi dan konsep yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald. Diplomasi multi-jalur

merupakan hasil perluasan dari *first track diplomacy* dan *second track diplomacy* (Noter, 1996). Diplomasi multi-jalur yang merupakan hasil pengembangan dari *first track diplomacy* dan *second track diplomacy* melibatkan sembilan jalur untuk menciptakan perdamaian dunia yaitu *Track One Diplomacy* (melalui negara), *Track Two Diplomacy* (melalui aktor non-negara), *Track Three Diplomacy* (melalui bisnis), *Track Four Diplomacy* (melalui warga negara), *Track Five Diplomacy* (melalui pendidikan), *Track Six Diplomacy* (melalui advokasi), *Track Seven Diplomacy* (melalui kepercayaan/religi), *Track Eight Diplomacy* (melalui pendanaan), dan *Track Nine Diplomacy* (melalui media). Konsep diplomasi multi-jalur membantu penelitian dalam melihat bagaimana proses pemerintah Indonesia mendaftarkan seni pembuatan kapal pinisi ke UNESCO sebagai *Intangible Cultural Heritage*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Menurut Taylor dan Bogan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif tentang kata-kata baik lisan maupun tulisan serta tingkah laku objek yang akan diteliti (Sutinah, 2013: 166).

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang berasal dari buku, *e-book*, dan dalam bentuk *online* yang berkaitan dengan artikel, jurnal, dan skripsi. Penelitian ini menggunakan jurnal-jurnal yang terkait dengan upaya Indonesia seperti Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun

2012. Jurnal yang digunakan untuk menggambarkan keunikan Kapal Pinisi berjudul Belajar Bertukar Pengalaman Dalam Transformasi Budaya Wirausaha. Penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari skripsi dengan judul, "Pengakuan UNESCO Terhadap Sistem Subak Bali Sebagai Warisan Budaya Dunia".

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis kedua yaitu negara secara umum dalam hubungan internasional dan akan ditekankan sesuai pemilahan Mas'ood (Mas'ood, 1994: 41) yaitu: analisis negara berasumsi bahwa semua pengambil keputusan dalam hubungan internasional, khususnya politik luar negeri didominasi oleh perilaku negara.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan metode luring maupun daring. Penyajian data disajikan dalam penelitian ini berbentuk teks naratif dan gambar yang sesuai dengan topik bahasan pada masing-masing bab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kapal Pinisi Indonesia dan Warisan Budaya Takbenda UNESCO

Kapal Pinisi diperkiraan telah berlayar sebelum tahun 1500 masehi (Muslimin, 2018: 144). Berdasarkan naskah Lontarak I Babad La Galigo, Kapal Pinisi telah ada sejak abad ke-14 masehi (Kennichi, 2018). Kisah dari naskah tersebut menceritakan perjalanan cinta Sawerigading yang merupakan Putera Mahkota Kerajaan Luwu yang berlayar ke Tiongkok dan

menikah dengan We Cudai. Dalam perjalanannya kembali ke Luwu, kapal yang ditumpangi diterjang ombak dan terbelah menjadi tiga bagian yang terdampar di Desa Ara, Tanah Beru, dan Lemo-lemo yang akhirnya dikenal sebagai negeri pembuat Pinisi (Kemendikbud, Rumah Belajar untuk Semua:Perahu Pinisi).

Kapal Pinisi dikenal dengan proses pembuatannya yang dilakukan oleh *panrita lopi* melibatkan proses ritual (Dewi, 2016: 35) seperti upacara penebangan kayu (*anna'bang kaju*), upacara menebang lunas (*annakbang kalabiseang*), upacara upacara memotong ujung lunas (*annata*), upacara menolak datangnya bahaya (*appasikkiri*), upacara pembuatan pusat kapal (*ammosi*), dan upacara peluncuran kapal (*anyyorong lopi*).

Kapal Pinisi menjadi penting bagi Indonesia karena tidak hanya menjadi bukti adanya sistem pengetahuan lokal dan perkapalan tradisional tetapi juga merupakan warisan yang diteruskan dari generasi ke generasi seperti adanya proses Ni Antarki, Ni Pauang, Ni Awasi, dan Nipakahajikang yang diajarkan oleh *panrita lopi* dari generasi ke generasi berikutnya (Muslimin, 2018: 152). Selain itu dalam proses pembuatan Kapal Pinisi yang dikerjakan oleh *panrita lopi* terdapat nilai budaya yang mencerminkan filosofi kehidupan masyarakat Indonesia seperti nilai gotong royong, nilai keindahan, nilai ketelitian, nilai kerja keras, dan nilai religi (Info Budaya, 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Komisi Nasional

Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Interaksi Indonesia dengan UNESCO dibuktikan sejak bergabungnya Indonesia menjadi anggota pada 27 Mei 1950 (KWRIU : Kemendikbud). Hubungan negara dengan organisasi internasional seperti ini tidak terlepas dari adanya kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut terhadap organisasi internasional. Indonesia secara garis besar mendirikan KNUI dengan visi dan misi untuk menjadi representasi profesional untuk mengharumkan nama dan martabat bangsa (meningkatkan citra Indonesia dalam forum UNESCO) ; melalui diplomasi multilateral (dengan sasaran meningkatkan kerja sama multilateral); memperjuangkan kepentingan nasional dan dapat menarik manfaat sebesar-besarnya untuk Indonesia dari program UNESCO (KWRI : Kemendikbud).

Melalui visi dan misi tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai aktor negara dalam sistem hubungan internasional tidak hanya membangun interaksi dengan aktor organisasi internasional seperti UNESCO hanya untuk sekedar menjadi anggota tetapi juga karena memiliki kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia untuk membangun citra di forum UNESCO tidak hanya ditujukan bagi organisasi internasional tersebut tetapi juga bagi negara-negara anggota lainnya. Sementara fungsi dari KNUI adalah untuk melancarkan pengembangan dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam dunia internasional secara khusus pendidikan, ilmu pengetahuan,

kebudayaan dan komunikasi melalui adanya kerja sama dengan UNESCO; serta mengambil peran dalam menetapkan program dan kegiatan UNESCO dengan mengingat adanya kepentingan nasional maupun internasional. Dengan demikian dapat dikatakan Indonesia memiliki kepentingan dalam memajukan dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan komunikasi baik di dalam negeri maupun secara internasional dengan keikutsertaannya dalam kegiatan atau program UNESCO.

4.2 Upaya Mendaftarkan Kapal Pinisi Sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO

Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar yang berada dibawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) pada saat itu tahun 2010, telah melakukan pendataan Budaya Takbenda yang ada di daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pendataan tersebut berupa pencatatan dan inventarisasi warisan budaya takbenda. Proses pencatatan dan inventarisasi pada saat itu dipimpin oleh Suriadi Mappangara (Kumparan, 2017). Kapal Pinisi saat itu masuk dalam pencatatan melalui pengisian formulir tersebut. Pengisian formulir tersebut diisi oleh Drs. Shaifuddin Bahrum, M.Si pada tanggal 4 Januari 2010 (Kumparan, 2017). Setelah pencatatan dan pengisian formulir tersebut, Kapal Pinisi tidak langsung menjadi warisan budaya takbenda secara nasional. Tahun 2013, merupakan tahun

dimana Kapal Pinisi masuk di dalam daftar Warisan Budaya Bakbenda, dengan nomor urut ke-52, kategori Teknologi Tradisional, mewakili Sulawesi Selatan (Kemendikbud : WTTB, 2013).

Setelah Kapal Pinisi resmi menjadi warisan budaya takbenda Indonesia, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan Kapal Pinisi ke UNESCO untuk dijadikan sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia (*Intangible Cultural Heritage*). Pengisian formulir UNESCO mulai dilakukan pada tahun 2014. Pengisian formulir merupakan salah satu syarat yang diwajibkan oleh UNESCO. Dengan demikian, maka tim dari Kementerian melibatkan beberapa pakar budaya dalam bidang maritim dan perkapalan, budayawan dan tokoh masyarakat dari Bulukumba di Makassar serta masyarakat yang mendukung kebudayaan Pinisi untuk membuat rumusan-rumusan dalam formulir (Kumparan, 2017). Melalui proses tersebut maka dihasilkanlah judul : "*Pinisi : The Art of Boatbuilding in South Sulawesi*".

Upaya mendaftarkan Seni Pembuatan Kapal Pinisi dilakukan dengan melengkapi berkas pertama yakni berkas nominasi Kapal Pinisi di UNESCO yang tercatat dengan Nomor. 01197 yang dimasukan pada 31 Maret 2016 dan akan dibahas sebagai warisan budaya takbenda kemanusiaan (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam sidang ke-12 tahun 2017, di Kepulauan Jeju-Korea Selatan. Berkas nominasi berisi informasi terkait negara pihak yang mengajukan, nama

elemen *warisan budaya takbenda*, perwakilan kelompok pembuat elemen yakni para pembuat kapal dari Lemo-Lemo, Ara, dan Bira. Terdapat pula proses indentifikasi dari Kapal Pinisi yang dijabarkan, kontribusi Kapal Pinisi terhadap warisan budaya dunia, serta tindakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui tindakan perlindungan pemerintah menjabarkan bahwa sebanyak 500 orang dipekerjakan dalam pembuatan kapal di Tana Beru dan Bira dan 200 orang di Batu Licin. Selama dua dekade terakhir, terdapat beberapa investor asing yang memesan sejumlah kapal motor besar. Upaya perlindungan juga dilakukan melalui pendidikan formal yang diwujudkan dengan adanya Program Studi Teknik Kelautan, Fakultas Teknik Universitas Hassanudin di Makassar yang sedang mengembangkan sebuah kurikulum untuk pembuatan kapal kayu. Upaya lainnya yaitu pemerintah menginisiasi kredit usaha kecil negara serta sejumlah lembaga keuangan swasta pun turut mengalokasikan dana kredit untuk membangun kapal.

Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan perlindungan dengan mengajukan program-program sebagai berikut :

1. Program perlindungan yaitu dilakukannya proses inventarisasi, dokumentasi, dan persiapan bahan baku utama yakni kayu dengan adanya program penanaman kembali pohon sehingga bahan baku utama akan tetap tersedia secara berkelanjutan.
2. Program pengembangan persiapan bahan ajar di sekolah, bantuan pendampingan bisnis serta memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup komunitas pembuat Kapal Pinisi, dan pemanfaatan berupa kegiatan promosi dalam bentuk festival desain dan kompetisi

Dalam berkas nominasi dipaparkan terkait partisipasi masyarakat dalam proses pencalonan Kapal Pinisi. Terdapat partisipasi dari komunitas maupun perwakilan rakyat seperti dari Komunitas KITA JI, Koperasi Kerajinan Kapal Rakyat, Yayasan Makassar SKALIA, serta perwakilan beberapa *panrita lopi* dan pelaut.

Berkas berikut yang dilengkapi adalah berkas inventaris Kapal Pinisi yang diserahkan ke pihak komite menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berkas inventaris berisi nama karya budaya, nama orang yang melaporkan karya budaya untuk didaftarkan yakni Drs, Shaifuddin Bahrum, M.Si pada tanggal 4 Januari 2010 di Makassar. Dipaparkan secara singkat mengenai sejarah singkat Kapal Pinisi. Terdapat pula nama komunitas atau perorangan yang menjadi penanggung jawab karya budaya yang diusulkan yakni H. Muslimin Baso yang merupakan guru budaya. Penjabaran bahwa Kapal Pinisi masuk dalam kategori kemahiran kerajinan tradisional serta upaya pelestarian yang diupayakan pemerintah Indonesia yaitu promosi lisan

dan promosi melalui internet. Menurut guru budaya Pinisi merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan sehingga perlu dilakukan tindak pencatatan hak karya intelektual agar warisan budaya ini tidak diambil atau diklaim oleh negara lain. Bagian terakhir berkas inventaris juga melampirkan dokumentasi foto dan referensi yang digunakan dalam melengkapi formulir inventaris.

4.3 Analisis Diplomasi Multi-Jalur Pemerintah Indonesia Mendaftarkan Kapal Pinisi Sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO

Diketahui bahwa Seni Pembuatan Kapal Pinisi dalam Keputusan 12.COM 11.b.13 (ICH : Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi) bahwa warisan ini ditetapkan oleh komite ICH untuk masuk dalam daftar Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan. Dimana melalui berkas nominasi yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia, Kapal Pinisi telah memenuhi kriteria yang ditentukan karena pembuatan Kapal Pinisi merupakan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun dan menjadi lambang tradisi maritim nusantara; pengusulan Kapal Pinisi sebagai warisan budaya takbenda mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem pengetahuan dan kearifan lokal yang mengarah kepada penghormatan kepada warisan tersebut; pembuatan kapal telah mempekerjakan 500 orang dan telah mengupayakan perlindungan dengan cara inventarisasi pembuatan Kapal Pinisi serta pendokumentasian; sejak 2014 Indonesia telah melakukan persiapan untuk pengusulan Kapal Pinisi yang melibatkan

para pemangku budaya, komunitas, organisasi non-pemerintah, akademisi dan peneliti, pemerintah pusat hingga daerah serta melibatkan tokoh masyarakat yang memberi persetujuan untuk pengusulan tanpa adanya paksaan dan tidak membagikan rahasia pembuatan kapal; dan usaha yang telah dilakukan pada tahun 2010 untuk mencatat Kapal Pinisi sebagai warisan budaya takbenda nasional. Sehingga dengan demikian, Seni Pembuatan Kapal Pinisi di Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam daftar perwakilan warisan budaya takbenda kemanusiaan UNESCO

Berdasarkan konsep warisan budaya takbenda, Kapal Pinisi masuk dalam kriteria kemahiran kerajinan tradisional. Kapal Pinisi secara fisik merupakan karya benda yang dapat disentuh, tetapi yang menarik bukanlah karya benda itu tetapi pengetahuan dan keahlian tradisional selama proses pembuatannya. Tidak hanya itu, tetapi keahlian dalam pembuatan Kapal Pinisi hanya dimiliki oleh beberapa orang dalam komunitasnya di Kabupaten Bulukumba. Orang yang memiliki pengetahuan dalam pembuatan pembuatan Kapal Pinisi adalah *panrita lopi* dan sawi (tukang yang membantu *panrita lopi*).

Pendaftaran Seni Pembuatan Kapal Pinisi oleh pemerintah Indonesia melibatkan aktor-aktor lain yang bekerja sama mendukung upaya tersebut. Upaya pendaftaran Seni Pembuatan Kapal Pinisi Penelitian ini kemudian menemukan serta menganalisis upaya aktor-aktor tersebut yang telah dilakukan untuk memperkenalkan

Kapal Pinisi ke publik dan masyarakat internasional.

1. *Track One Diplomacy* (Diplomasi Melalui Jalur Negara)

Jalur formal yang ditempuh dalam upaya mendaftarkan seni pembuatan Kapal Pinisi ke UNESCO adalah melalui pemerintah. Pemerintah Indonesia yang terlibat dalam upaya ini terdiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, hingga pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi formal untuk memperkenalkan Kapal Pinisi melalui kerja sama dengan negara lain dalam mengadakan atau terlibat dalam festival atau pameran yang dilakukan oleh negara lain seperti *Belgrade International Fair of Tourism 2014*, *Seatrade Cruise Asia 2016*, *WBTB Road to UNESCO 2017*, Pameran Travel di Malaysia 2017, Pameran Europalia 2017, dan Festival Pinisi 2017. Keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam kegiatan-kegiatan ini terlihat dari pemilihan *booth* Indonesia yang menggunakan replika Kapal Pinisi sebagai bentuk upaya memperkenalkan Kapal Pinisi serta mendukung proses pencalonan Kapal Pinisi sebagai *Intangible Cultural Heritage* UNESCO.

2. *Track Two Diplomacy* (Diplomasi Melalui Organisasi Non-Negara)

Upaya diplomasi dalam mengenalkan Kapal Pinisi kepada publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor lain seperti organisasi non-pemerintah /NGO (Non-government

Organization). Organisasi non-pemerintah yang turut terlibat dalam upaya pengusulan Kapal Pinisi ke UNESCO yang tertulis dalam Berkas Tanggapan Indonesia kepada Komite Evaluasi Seni Pembuatan Kapal Pinisi (NO.01197) dalam Draft Decision 12.COM 11.b.13 (ICH : Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi) yaitu Komunitas KITA JI, Yayasan Baruga Nusantara, Koperasi Kerajinan Kapal Rakyat, dan Yayasan Makassar SKALIA. Yayasan Makassar SKALIA merupakan salah satu dari organisasi non-pemerintah yang turut berperan dalam upaya pelestarian Kapal Pinisi. Adanya aktivitas dan gerakan yang dilakukan oleh Yayasan Makassar SKALIA ini dapat dikategorikan sebagai upaya diplomasi melalui organisasi non-pemerintah. Upaya ini merupakan bentuk dukungan untuk menjaga kelestarian pengetahuan akan budaya maritim, terutama pengetahuan tradisional dalam pembuatan Kapal Pinisi.

3. *Track Three Diplomacy* (Diplomasi Melalui Bisnis)

Diplomasi melalui jalur bisnis ini melibatkan peran dari para pelaku bisnis dalam menciptakan kerja sama secara internasional dalam bidang ekonomi. Diplomasi melalui jalur ini dapat membangun hubungan dan interaksi ekonomi antarnegara. Kapal Pinisi merupakan karya budaya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam komunitas yang membuatnya. Dalam berkas nominasi Kapal Pinisi ke

UNESCO terkait tindakan perlindungan disebutkan bahwa selama dua dekade terakhir terdapat investor asing yang memesan sejumlah kapal motor besar untuk dipasarkan sebagai Pinisi Layar Besar untuk pelayaran antar kepulauan.

4. *Track Four Diplomacy* (Diplomasi Melalui Warga Negara)

Diplomasi melalui jalur ini merupakan diplomasi yang melibatkan warga negara dalam kegiatan yang dilakukan oleh negara atau organisasi non-pemerintah. Upaya pengusulan Seni Pembuatan Kapal Pinisi ke UNESCO oleh pemerintah Indonesia melibatkan banyak aktor termasuk warga negara. Syaifuddin Bahrum merupakan individu yang melakukan pendataan awal Kapal Pinisi, kemudian H. Muslimin Baso adalah seorang panrita lopi yang turut mendukung upaya pemerintah Indonesia mendaftarkan Kapal Pinisi ke UNESCO bersama-sama dengan panrita lopi lainnya yaitu H. Muh. Jafar HB, H. Abdullah serta pelaut H. Sapparin dan Andi Ahmad Nur yang tercatat dalam Berkas Tanggapan Indonesia kepada Komite Evaluasi Seni Pembuatan Kapal Pinisi (NO.01197) dalam Draft Decision 12.COM 11.b.13 (ICH : Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi). Dalam berkas tanggapan tersebut tertulis nama individu atau warga negara yang juga turut berpartisipasi seperti Horst Liebner, Mukhlis Paeni, dan M. Arsyad. Dalam berkas Pernyataan dan Persetujuan Masyarakat atas Berkas Nominasi Pinisi Indonesia, Seni Pembuatan Perahu

Sulawesi Selatan kepada UNESCO berisi sebanyak 86 tanda tangan masyarakat yang telah membaca atau mendengar presentasi tentang isi berkas nominasi Pinisi Indonesia untuk didaftarkan sebagai bentuk persetujuan dan dukungan.

5. *Track Five Diplomacy* (Diplomasi Melalui Pendidikan)

Diplomasi melalui jalur ini melibatkan pendidikan sebagai sarana memperkenalkan Kapal Pinisi baik untuk kalangan masyarakat umum, anak-anak, dan pelajar. Upaya untuk memperkenalkan Kapal Pinisi kepada pelajar, diwujudkan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya yang bekerja sama dengan Komunitas Hong untuk mengadakan Workshop Kapal Pinisi dan Rempah. Kegiatan ini diadakan di Taman Krida Budaya dan diikuti oleh 50 pelajar Sekolah Dasar dan 50 Pelajar Sekolah Menengah Pertama di Malang (Cendana News, 2016).

Upaya selanjutnya yang ditempuh melalui jalur ini diwujudkan dengan adanya buku cerita rakyat untuk kanak-kanak dengan judul "Pinisi Si Kapal Ajaib", ditulis oleh Dedi Arsa dan diterbitkan oleh Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud, 2017). Upaya melalui jalur pendidikan ini juga melibatkan Universitas Hasanuddin Makassar seperti yang tertulis Berkas Tanggapan Indonesia kepada Komite Evaluasi Seni Pembuatan Kapal Pinisi (NO.01197) dalam Draft Decision 12.COM 11.b.13

(ICH : Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi).

6. *Track Nine Diplomacy* (Diplomasi Melalui Media)

Diplomasi jalur ini mempertegas peran penting media informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan keistimewaan karya seni budaya yang diusulkan ke UNESCO. Media yang dapat dimanfaatkan yaitu media elektronik dan media cetak. Upaya pemerintah Indonesia dalam mempromosikan Kapal Pinisi seperti yang tertulis dalam berkas inventaris yaitu promosi secara lisan dan promosi melalui media internet.

Terdapat beberapa artikel yang terdaftar dalam arsip tautan berita online terkait aktivitas yang telah dikerjakan oleh KWRI (Kantor Wakil Republik Indonesia) untuk UNESCO dalam upayanya mempromosikan dan memberikan informasi kepada publik tentang Kapal Pinisi. Diplomasi melalui media internet ini sangat efektif untuk mempromosikan Kapal Pinisi kepada masyarakat sehingga secara tidak langsung akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan publik. Pemanfaatan teknologi internet ini tentu memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui Kapal Pinisi sebagai kapal tradisional milik Indonesia. Sehingga akan menumbuhkan rasa kepedulian dalam masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan mendukung pengusulan Kapal Pinisi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke UNESCO

untuk menjadi salah satu warisan budaya takbenda dunia.

5. SIMPULAN

Kapal Pinisi resmi menjadi *Intangible Cultural Heritage* UNESCO pada tanggal 7 Desember 2017. Penelitian ini melihat bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mendaftarkan seni pembuatan Kapal Pinisi kedalam *Intangible Cultural Heritage* UNESCO. Tahun 2010, melalui Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, pemerintah melakukan pendataan terhadap warisan budaya takbenda dan mencatat Kapal Pinisi sebagai salah satunya. Kapal Pinisi menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang diakui secara nasional pada tahun 2013.

Setelah diakui menjadi warisan budaya takbenda nasional, pemerintah menaruh fokus khusus pada Kapal Pinisi yang dibuktikan dengan dimulainya pengisian formulir pendaftaran ke UNESCO pada tahun 2014. Pemerintah kemudian mengajukan Kapal Pinisi sejak tahun 2015, akan tetapi pada tahun yang sama, Kantor Delegasi Tetap RI untuk UNESCO menerima informasi dari Sekretariat Konvensi Intangible Cultural Heritage bahwa proses nominasi Seni Pembuatan Kapal Pinisi yang seharusnya siap dibahas tahun 2016 harus diundur ke tahun 2017. Penundaan tersebut memberikan dampak positif bagi pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berkas nominasi dan inventaris yang akan dikirimkan ke pihak komite sebelum disidangkan. Berkas

nominasi dan inventaris Seni Pembuatan Kapal Pinisi merupakan berkas penting yang berisikan upaya perlindungan yang diajukan oleh Indonesia kepada pihak UNESCO.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa melalui upaya administratif yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui berkas-berkas yang diajukan, selain itu upaya politis lain yang dilakukan dengan melibatkan aktor-aktor lain yang mendukung upaya Indonesia untuk mendaftarkan Seni Pembuatan Kapal Pinisi. Aktor-aktor tersebut menjadi bagian dari jalur diplomasi yang dilakukan selain dari diplomasi jalur formal. Jalur formal yang ditempuh dalam upaya mendaftarkan Seni Pembuatan Kapal Pinisi ke UNESCO adalah melalui pemerintah Indonesia sebagai aktor negara. Jalur kedua yang ditempuh adalah melalui organisasi non-pemerintah seperti Komunitas KITA Ji, Yayasan Baruga Nusantara, Koperasi Kerajinan Kapal Rakyat, dan Yayasan Makassar SKALIA yang berperan dalam pembuatan kegiatan yang memberi dampak positif bagi pelestarian Kapal Pinisi. Diplomasi jalur ketiga adalah melalui bisnis yang dapat menciptakan kerja sama dalam bidang ekonomi dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam komunitas yang membuat Kapal Pinisi. Jalur ke empat yang ditempuh adalah melalui warga negara, dimana peran warga negara merupakan kunci penggerak suatu kebudayaan serta dalam proses ini membuktikan bahwa warga negara/masyarakat turut mendukung dan

melestarikan karya budaya yang diajukan ke UNESCO. Jalur berikutnya yang ditempuh adalah melalui pendidikan yang diberikan bagi generasi muda dan pelajar baik di tingkat Sekolah Dasar hingga usulan pengembangan kurikulum pembuatan kapal di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar serta terlibatnya para peneliti dan akademisi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian Kapal Pinisi. Jalur terakhir yang ditempuh adalah melalui media sebagai salah satu bentuk dukungan mempromosikan Kapal Pinisi baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan media elektronik dan media cetak.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Mas'ood, Mohtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. PT. Pustaka LP3S Indonesia : Jakarta.
- Sutinah & Bagong. 2013. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana Prenadamedia Group : Jakarta.

Jurnal :

- Amir, Rudi. 2016. *Belajar Bertukar Pengalaman Dalam Transformasi Budaya Wirausaha*. Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses melalui: http://repository.upi.edu/25974/3/D_PLS_1201658_Chapter1.pdf, pada 22 Februari 2019.
- Harto, Syafri & Gloria, Nuvola. *Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012*. Ilmu Hubungan Internasional-FISIP Universitas Riau. Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publication/s/31242-ID-diplomasi-indonesia-terhadap-unesco-dalam-meresmikan->

[noken-sebagai-warisan-buday.pdf](#), pada 21 Januari 2019.

Supratman, Anggareni, Fitra, Sarina & Muslimin. 2018. *Eksistensi Panrita Lopi: Studi Tentang Sulitnya Regenerasi Pengrajin Kapal Pinisi di Kecamatan Bonto Bahari*. *Patrawidya*. Vol. 19, No 2. Diakses melalui: <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=952621&val=14682&title=EKSISTENSI%20PANRITA%20LOPI:%20STUDI%20TENTANG%20SULITNYA%20REGENERASI%20PENGRAJIN%20KAPAL%20PINISI%20DI%20KECAMATAN%20BONTO%20BAHARI>, pada 06 Juli 2019.

Skripsi :

Arif, Afit. 2019. *Pengakuan UNESCO Terhadap Sistem Subak Bali Sebagai Warisan Budaya Dunia*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses melalui: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25860/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>; <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25860/8.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, pada 15 Juli 2019.

Nirmala, Dewi. 2016. *Upacara Pembuatan Perahu Pinisi Di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Diakses melalui: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/938/1/Nirmala%20Dewi.pdf>, pada 13 Juli 2019

Website :

Bahrum, Shaifuddin. 2017. *Mengapa Pinisi Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia Oleh UNESCO?*. Diakses melalui: <https://kumparan.com/kabar-wajo/mengapa-pinisi-ditetapkan-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-dunia-oleh-unesco>, pada 15 Juli 2019.

Cyriil. 2016. *WBD Kemendikbud Kenalkan Kapal Pinisi Lewat Workshop di Kota Malang*. Diakses melalui: <https://www.cendananews.com/2016/09>

[/wdb-kemendikbud-kenalkan-kapal-pinisi-lewat-workshop-di-kota-malang.html](#), pada 1 Agustus 2019.

Faruk, M Fahrulraz. 2017. *Refleksi Indonesia Sebagai Negara Maritim*. Diakses melalui: <https://geotimes.co.id/opini/refleksi-indonesia-sebagai-negara-maritim/>, pada 1 Februari 2019.

Info Budaya. 2017. *5 Filosofi Hidup Di Balik Kapal Pinisi*. Diakses melalui: <http://www.infobudaya.net/2017/09/5-filosofi-hidup-di-balik-kapal-pinisi/>, pada 13 Juli 2019.

Kemendikbud. 2017. *Pameran "Pendukung Warisan Budaya Tak Benda Road To UNESCO" Pinisi, Pantun dan Pencak Silat*. Diakses melalui: <https://setjen.kemdikbud.go.id/setjen/berita-pameran-%E2%80%9Cpendukung-warisan-budaya-takbenda-road-to-unesco%E2%80%9D-pinisi-pantun-dan-pencak-silat.html>, pada 24 Juli 2019.

Kemendikbud. 58. *Isi dan Sampul Pinisi Si Kapal Ajaib*. Diakses melalui: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/58.%20Isi%20dan%20Sampul%20Pinisi%20Si%20Kapal%20Ajaib.pdf>, pada 11 Juli 2019.

Kemendikbud. *Perahu Pinisi : Rumah Belajar Untuk Semua*. Diakses melalui: <https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/phinisi/>, pada 14 November 2018.

Kemendikbud. *Tautan Berita di Media*. Diakses melalui: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PGdl71MITcQJ:kwriu.kemdikbud.go.id/arsip/arsip-berita/tautan-berita-di-media/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, pada 10 Agustus 2019.

Kemendikbud. *Visi, Misi, dan Sasaran Strategis*. Diakses melalui: <http://kwriu.kemdikbud.go.id/tentang-kami/visi-misi-dan-sasaran-strategis/>, pada 16 November 2019.

Kennichi, T. 2018. *Teknologi Pembuatan Kapal Pinisi Kabupaten Bulukumba*.

Diakses melalui:
https://www.academia.edu/37901782/TEKNOLOGI_PEMBUATAN_KAPAL_PINISI_KABUPATEN_BULUKUMBA_1, pada 06 Juli 2019.

KSA, Ditjen. 2015. *Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Diakses melalui: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>, pada 10 Januari 2019.

Notter, James & Diamond, James. 1996. *Building Peace and Transforming Conflict: Multi-track Diplomacy in Practice* : Occasional Paper 9. Hal. 4. Diakses melalui: <http://imtd.org/wp-content/uploads/2017/03/op-7.pdf>, pada 31 Maret 2019.

Program YMS. Diakses melalui: <https://www.yayasanmakassarskalia.org/program>, pada 29 Juli 2019.

UNESCO. Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi : Nomination file No. 01197 (ICH Inventory – provided during the Committee: English). Diakses melalui: <https://ich.unesco.org/en/RL/pinisi-art-of-boatbuilding-in-south-sulawesi-01197>, pada 10 Agustus 2019.

UNESCO. Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi : Decision (Inscription: 12.Com 11.b.13). Diakses melalui: <https://ich.unesco.org/en/RL/pinisi-art-of-boatbuilding-in-south-sulawesi-01197>, pada 10 Agustus 2019.

UNESCO. Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi : ICH Inventory : English/Indonesian. Diakses melalui: <https://ich.unesco.org/doc/download.php?versionID=42444>, pada 10 Juli 2019.

UNESCO. Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi : Nomination Form: English. Diakses melalui: <https://ich.unesco.org/doc/download.php?versionID=43820>, pada 17 Juli 2019.

UNESCO. Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi', Decision : Inscription 11.b.13. Diakses melalui: [https://ich.unesco.org/en/RL/pinisi-art-of-](https://ich.unesco.org/en/RL/pinisi-art-of-boatbuilding-in-south-sulawesi-01197)

[boatbuilding-in-south-sulawesi-01197](https://ich.unesco.org/en/RL/pinisi-art-of-boatbuilding-in-south-sulawesi-01197), pada 20 Juli 2019.

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia' : SK Penetapan (Bahasa Indonesia) Tahun 2013. Diakses melalui: <http://kwriu.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2017/11/5-SK-WBTb2013-SK-2013.pdf>, pada 15 Juli 2019.